

# BAB I

## PENDAHULUAN

Disadari ataupun tidak, sesungguhnya manusia memiliki naluri dan watak berpolitik, watak untuk mengatur, mempengaruhi, dan menghegemoni orang lain. Berpolitik merupakan aktualisasi diri dalam ranah publik sebagai bukti bahwa dirinya memiliki kekuatan yang dapat didarmabaktikan kepada bangsa dan negara atau kepada masyarakat luas. Selain itu berpolitik juga panggilan dari ajaran Islam, salah satunya untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Tidaklah herakan kalau dalam bentangan sejarah yang panjang, sejak Rasulullah Muhammad saw, khulafaurrasyidin, Umayyah (661-750) sampai Abbasiyah (750-1258) diwarnai kejayaan dalam bidang politik, karena kemampuannya melakukan ekspansi atau futuhat<sup>1</sup> ke negara-negara atau daerah lain.<sup>2</sup> Selain itu, karena persoalan politik juga, perpecahan, peperangan dan pertumpahan darah di tubuh umat Islam tidak dapat dielakkan. Perang jamal antara menantu dan mertua (Ali bin Abi Thalib dengan ‘Aisyah), perang siffin antara khalifah dengan gubernur (Ali bin Abi Thalib dengan Mu’awiyah) sebagai bukti sejarah yang sulit dibantah. Peristiwa politik ini sebagai bahan analisis orientalis, yang berkesimpulan bahwa berkembangnya Islam karena

---

<sup>1</sup> Istilah *futuhat* digunakan oleh Ismail R. Faruqi untuk menjelaskan kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad dalam setiap peperangan dalam menaklukkan bangsa lain, namun sesungguhnya *futuhat* itu tidak dalam arti penaklukkan secara fisik kebendaan, melainkan *futuhat* adalah pembukaan hati dan pemikiran manusia terhadap kebenaran ajaran Islam. Lihat Ismail R. Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1992, hlm. 212.

<sup>2</sup> Lihat Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Kesatu & dua*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999, hlm. 55-68.

perang, berarti umat Islam suka menumpahkan darah. Hal ini diperkuat perilaku politik negara-negara Islam yang tidak dapat bersatu, malah berperang sesama negara Islam, misalnya Iran-Irak, Iran-Kuwait. Juga konflik sesama gerakan politik di Timur Tengah,<sup>3</sup> misalnya antara Hamas dan Fatah di Palestina. Bahkan lahirnya aliran teologi Islam juga berawal dari masalah politik,<sup>4</sup> sehingga sesungguhnya Islam tidak dapat dilepaskan dari politik. Tidak hanya itu, munculnya hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang muslim atau non-muslim, karena didorong oleh motif-motif politik,<sup>5</sup> misalnya hadis di bawah ini:

يا علي إن الله غفر لك ولذريتك ولو أهلك ولشيعتك ولمحيبي شيعةك

*“Wahai ‘Ali, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu, keturunanmu, orang tuamu, keluargamu, pengikutmu, dan orang-orang yang menghidupkan syi’ahmu”*

Inilah kenyataan sejarah kalau Islam tidak dapat dilepaskan dari politik, dan umat Islam pernah “babak belur dalam sejarah”, bahkan “berdarah-darah”. Namun juga harus adil dalam meletakkan Islam dalam sejarah peradaban, yakni dengan cara

---

<sup>3</sup> Lihat Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008. Lihat pula Joel Beinin and Joe Stork (ed.), *Political Islam Essays From Middle East Report*. London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1972, hlm. 6. Lebih dijelaskan bahwa perang Siffin antara pihak Ali bin Abi Thalib (khalifah) dan Mu’awiyah (gubernur Damaskus—keluarga dekat Utsman bin Affan) melahirkan kesepakatan atau tahkim/arbitrase. Mereka yang tidak setuju terhadap arbitrase ini keluar dari pihak Ali dan membentuk kelompok Khawarij, yang menghalalkan darah orang-orang yang terlibat dalam arbitrase.

<sup>5</sup> Selain motif politik, para pembuat hadis palsu juga didorong oleh (1) fanatisme suku dan negara; (2) untuk memengaruhi masyarakat awam agar mendapat simpatik; (3) perbedaan madzhab dan teologi; (4) memotivasi masyarakat awam untuk berbuat baik; dan (5) untuk menjilat penguasa. Lihat Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008, hlm.184-188.

Islam diletakkan sebagai agama yang mencerahkan, membangun peradaban yang anggun dan suka kedamaian, sebagaimana makna yang terkandung dalam kata “أسلم – يسلم – إسلاما” itu sendiri, yang bermakna keselamatan, kedamaian, dan penyerahan. Islam hadir membebaskan umat masia dari belenggu sejarah, peradaban dan belenggu kultural, tradisi dan adat istiadat seperti pada zaman jahiliyah. Dari dua pemikiran yang ekstrim ini maka lahirlah pemikiran tengah, mengambil sebagian pemikiran kanan dan sebagian pemikiran kiri. Maka kalau dipetakan pemikiran hubungan agama dan politik<sup>6</sup> ini ada tiga, dan terus mewarnai dalam jagat pemikiran politik Islam, bahkan sampai pada tataran praksis. Ketiga pola pemikiran tersebut adalah; *pertama*, mereka yang memisahkan antara politik dan agama, keduanya berada dalam wilayah yang berbeda, agama adalah urusan ukhrawi dan politik urusan dunia. Pola inilah yang disebut dengan sekularisme (tokohnya: Thaha Husein dan Ali Abd.Raziq), di Indonesia Gus Dur. *Kedua*, mereka yang menyatakan bahwa antara agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, integralistik, karena agama tidak hanya berhubungan dengan ukhrawi saja, melainkan juga mengatur kehidupan di dunia.<sup>7</sup> Kesempurnaan Islam diyakini oleh umat Islam, karena Islam mengatur kehidupan secara menyeluruh dan diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik,

---

<sup>6</sup> Untuk mempertajam hubungan agama dan negara lihat beberapa buku ini, antrara lain (a) A.Munir Mulkhan, dkk., *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Protestan*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2002. (b) Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998. (c) Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubiungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1999. (d) Irfan S. Awwas, *Aksi Sejuta Umat dan Issu Negara Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press, 2000. (e) Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. (f) Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990. Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam*. New York: Winston, 1966, hlm. 241.

yang lebih dikenal dengan 3 D (*dien, dunya dan daulah*). Untuk itulah realisasinya harus diciptakan negara Islam, yakni sebuah negara ideologis yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.<sup>8</sup> Tokoh yang masuk dalam kelompok ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb dan Rasyid Ridha, sementara tokoh Indonesia adalah M. Natsir,<sup>9</sup> Hasyim Asy'ari, dan belakangan tokoh-tokoh yang bergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia. *Ketiga*, mereka yang menyatakan bahwa Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dan etika politik saja, bersifat simbiotik, karena Islam tidak mengatur sistem dan bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Tokohnya, Muhammad Husain Haikal,<sup>10</sup> kalau tokoh Indonesia adalah Syafii Ma'arif dan Amien Rais.

Berpijak dari ketiga pemikiran di atas dan realitas sejarah, Islam tidak pernah lepas dari politik, bahkan kehadiran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan berpolitik, dalam hal ini etika berpolitik, baik dalam Alquran maupun Alhadis—dua sumber ajaran Islam—yang otentik dan berlaku sepanjang zaman. Etika atau sering disebut dengan akhlak

---

<sup>8</sup> Nazih Ayubi, *Political Islam, Religion and Politics in the Arab World*. London & New York: Routledge, 1991, hlm. 63-64.

<sup>9</sup> M. Natsir pernah berpolemik dengan Soekarno tentang negara kebangsaan dan negara Islam yang akan diadikann bentuk negara Indonesia. Lihat Mahfud MD, *Inklusifisme Hukum Islam*, dalam Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. vi. Untuk memperjelas adanya gagasan dan usaha untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, lihat Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: Uswah, 2008. Juga menarik kalau diperhatikan polemik ada dan tidaknya negara Islam antara generasi tua, Mohamad Roem, dan generasi muda, Nurcholish Madjid, dalam Laksmi Pamuntjak dkk (penyunting), *Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem Tidak Ada Negara Islam*. Jakarta: Djambatan, 2000.

<sup>10</sup> Lihat Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001. Prinsip-prinsip negara Islam menurut Husain Haikal adalah persaudaraan sesama manusia, persamaan manusia dan kebebasan manusia.

menjadi salah satu ruang lingkup dari ajaran Islam, yakni akidah, ibadah, akhlak dan mua'amalah dunyawiyah. Kehidupan tanpa etika akan menjadi kacau, karena tidak ada yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupannya. Begitupun dalam hal politik, kalau tidak ada etikanya bisa jadi akan terus terjadi *chaos*, karena setiap orang ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin, ingin memiliki kewenangan, dan ingin menjadi kepala negara. Kehadiran agama salah satunya mengatur kehidupan dalam bidang politik agar tertata dengan rapi, prosedural dan terstruktur.

Dalam sejarah Islam, kadang etika diabaikan bahkan tidak menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang gubernur, Mu'awiyah misalnya, melawan Ali bin Abi Thalib yang menduduki kursi khalifah, keduanya konflik dalam medan perang siffin. Mertua, 'Aisyah istri Rasulullah, harus berhadapan dengan menantunya, Ali bin Abi Thalib, dalam medan perang jamal sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ujung dari perang ini adalah kekuasaan (*power*). Lantas muncul pertanyaan, apa Islam tidak mengajarkan tentang etika? Jawabannya normatif, jelas Islam mengajarkan etika, tidak hanya dalam politik, tetapi juga etika dalam kehidupan yang luas. Oleh karena jangan sampai umat Islam terjebak dan terbuai dengan *power* semata, sehingga meninggalkan etika, walaupun disadari bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari *power*.

*Politics is power*, politik adalah kekuasaan, atau *all politics is about power*, kata Andrew Heywood sewaktu berbicara tentang "*Power, Authority and*

*Legitimacy*”,<sup>11</sup> begitu juga esensi dari buku yang ditulis oleh Harold Lasswell’s, dengan judul “*Politics: Who Gets What, When, How*” (1936), siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya, dengan kata lain politik adalah siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan kekuasaan itu didapat, dan bagaimana caranya untuk memperoleh kekuasaan. Secara sederhana politik suatu kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dibatasi, karena itu menjadi hak setiap orang. Ambisi untuk memperoleh kekuasaan akan diwarnai dengan perbedaan dan konflik, karenanya untuk mendapatkan harus diperjuangkan (*power struggle*). Untuk itulah siapapun yang terjun ke politik, apalagi dalam bentuk politik praktis haruslah ada keinginan untuk memiliki kekuasaan, kalau tidak ada keinginan, maka yang terjadi sebaliknya akan tergilas oleh politik itu sendiri. Hal ini dapat disaksikan dalam panggung politik di Indonesia selalu diwarnai intrik, konflik dan perbedaan-perbedaan, dan tidak ada partai politik yang tidak konflik, bahkan harus pecah (*mufarraqah*) dari induknya, menjadi partai politik sendiri.

Contoh kongkritnya adalah partai politik di masa Orde Baru yang hanya tiga partai, yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kemudian pecah menjadi beberapa partai politik pada Era Reformasi, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

---

<sup>11</sup>Andrew Heywood, *Political Theory An Introduction*, third edition. New York: Palgrave Macmillan, 2004, hlm. 121.

Tabel 1  
Pecahan Partai Orde Baru

No.	Partai Politik	1999	2004	2009
1.	Golkar	1. PKP 2. Partai MKGR 3. Partai Golkar	1. PKPI 2. PGR 3. PKPB 4. Partai Golkar	1. Partai Hanura 2. Partrai Gerindra 3. Partai Golkar 4. PKPI 5. PPD
2.	PPP	1. PPP 2. Partai Persatuan	1. PPP Reformasi 2. PBR 3. PPP	1. PBR 2. PPP
3.	PDI	1. PDI 2. PDI Perjuangan 3. PND	1. PPDI 2. PDI Perjuangan 3. Partai Nasional Marhaenis 4. PNBK	1. PPDI 2. PDI Perjuangan 3. PNI Marhaenisme 4. PNBKI 5. PDP

Sumber: Diolah dari KPU dan Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas, 2004.

Alasan utama pecahnya partai politik di atas adalah *power*, mereka ingin mendapatkan *power*, sementara kendaraan politik yang ada tidak memungkinkan untuk mendapatkan *power*, karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Satu-satunya jalan adalah membentuk partai politik baru, walaupun ternyata kendaraan yang baru juga tidak semua dapat mengantarkan untuk mendapat *power* di lembaga eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan paparan historisitas di atas, maka penelitian ini mengambil tema tentang etika politik, dan yang diteliti atau sebagai obyeknya adalah Kitab Sunan Abu Dawud. Kitab ini menjadi obyek dari penelitian, dengan dua pertimbangan, adalah (1) kitab Sunan Abu Dawud telah disusun secara sistematis, sehingga memudahkan untuk melakukan pelacakan konsep etika politik; dan (2) Kitab Sunan Abu Dawud diyakini hadis-hadis yang dihimpun memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga

kitab Sunan ini dijadikan rujukan oleh umat Islam setelah al-Qur'an, selain kitab Shahih Bukhari dan Muslim. Walaupun menurut penelitian Muhibbin, tidak setiap kitab Shahih mengandung semua hadis yang shahih. Dalam Shahih Bukhari ditemukan beberapa hadis palsu dan *dha'if*.<sup>12</sup>

Lantas yang menjadi problem untuk dicari jawaban dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Etika Berpolitik dalam Islam (Kajian terhadap Kitab Sunan Abu Dawud)?”

---

<sup>12</sup> Muhibbin, “Hadis Palsu dan Lemah dalam Sahih Bukhari”, dalam *Republika*, Ahad 9 Agustus 2009, hlm. B8.